

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa konflik telah terjadi di Indonesia, baik itu yang berdasarkan suku, agama maupun ras (SARA). Seperti konflik antar agama di Poso pada tahun 1998, konflik etnis Madura di Sambas, Kalimantan Barat pada tahun 1999, konflik di Maluku tahun 1999-2004, kemudian darurat sipil di Aceh karena adanya Gerakan Aceh Merdeka (GAM), serta konflik mengenai ajaran Ahmadiyah di Indonesia (Leatemia, 2011 : 45).

Ada konflik yang dapat diselesaikan, namun ada juga konflik yang terus berlarut-larut. Seperti kasus mengenai pro-kontra ajaran Ahmadiyah yang telah terjadi selama puluhan tahun. Banyak yang menghujat dan juga banyak yang mendukung adanya ajaran Ahmadiyah di Indonesia. (www.suaramerdeka.com, diakses 4 Agustus 2011)

Ahmadiyah merupakan sebuah gerakan keagamaan yang dicetuskan oleh Mirza Ghulam Ahmad di India pada tahun 1889 (Hasan, 2006: 151). Ahmadiyah terbagi menjadi dua aliran, yaitu jamaah Ahmadiyah Qadian yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang Nabi dan jamaah Ahmadiyah Lahore yang menganggap bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang Mujahhid, setelah Mirzam Ghulam Ahmad wafat, (Ali, 2011: 1).

Ajaran Ahmadiyah telah masuk ke Indonesia sejak tahun 1925. Di Indonesia sendiri jamaah Ahmadiyah terbagi menjadi dua yakni Ahmadiyah Qadian dan

Ahmadiyah Lahore. Kedua aliran Ahmadiyah ini mempunyai cabang masing-masing di Indonesia. Secara resmi gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia berdiri pada tanggal 28 September 1929 di Yogyakarta dengan pengesahan hukum Besl. Gouvt 4 April 1930 No.1x (Extra-Bijvoegsel Yavasche Courant 22/4-30 No.32). Aliran ini menyebut dirinya Gerakan Ahmadiyah Indonesia. Sementara itu jamaah Ahmadiyah Qadian secara resmi disahkan pemerintah Republik Indonesia sebagai badan hukum dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.J.A/5/23/13 tanggal 13 Maret 1953 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 26, tanggal 31 Maret 1953 dengan nama Jamaah Ahmadiyah Indonesia (Zulkarnain, 2005: 202).

Potensi jamaah Ahmadiyah di Indonesia nampaknya sangat besar dimana sejak awal berdirinya sampai dengan saat ini jamaah Ahmadiyah berhasil tumbuh dan menyebar di seluruh provinsi Indonesia, hal ini terbukti sejak tahun 1932 jamaah Ahmadiyah berhasil tumbuh dan menyebar di berbagai wilayah dan saat ini diperkirakan jamaah Ahmadiyah sudah mempunyai 181 cabang yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia (Mahally, 2006: 69).

Di Yogyakarta, dapat dikatakan Ahmadiyah Lahore berkembang. Ahmadiyah Lahore memiliki kantor pusat di daerah Kotabaru, Yogyakarta. Bahkan Ahmadiyah Lahore memiliki institusi pendidikan yang berkembang dengan baik di Yogyakarta.

Yogyakarta yang merupakan kota pelajar, banyak penduduknya yang merupakan pendatang, hal ini dapat kita lihat dengan tersedianya rumah kontrakan dan juga tempat kost. Pendatang di kota Yogyakarta berasal dari berbagai macam

daerah di Indonesia maupun dari mancanegara. Para pendatang tersebut terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama dan ras. Di tengah pluralitas yang ada, Yogyakarta dapat dikatakan aman dan nyaman sebagai tempat untuk menimba ilmu. Para penduduk asli maupun pendatang sama-sama berusaha untuk menjaga keamanan dan ketenteraman Yogyakarta.

MUI (Majelis Ulama Indonesia), sebuah lembaga yang seharusnya melindungi dan mengayomi semua golongan umat Islam, justru mengadakan seminar sehari pada 11 Agustus 2002, yang para pembicaranya menghasut agar Ahmadiyah dibubarkan. Dasar para pembicara tersebut ialah keputusan Munas MUI No.5/Kep/Munas/MUI/1980 yang menetapkan Ahmadiyah sebagai jamaah di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Padahal Ahmadiyah menganut hukum Islam dan rukun Islam sebagaimana umat Islam lainnya. Hal ini, yang menjadi latar belakang penelitian skripsi yang dilakukan oleh Fandy Akhmad. Ia melakukan penelitian mengenai jamaah Ahmadiyah di desa Baciro, Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitiannya, Jamaah Ahmadiyah di sana dapat hidup berdampingan, damai tenteram dan mampu menjaga keharmonisan meskipun ditengah arus kebencian terhadap mereka. Jamaah Ahmadiyah bebas melakukan aktivitas dengan aman, bahkan terjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat Baciro. Toleransi yang dibangun oleh jamaah Ahmadiyah bersifat toleransi keagamaan yang memiliki hak yang sama dalam hukum, berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan jamaah Ahmadiyah dalam kegiatan bermasyarakat. Adanya hubungan yang baik antara masyarakat Baciro dengan jamaah Ahmadiyah

menandakan kedewasaan berpikir dan pemahaman yang utuh terhadap sesama manusia yang berbeda keyakinan (Akhmad, 2009: 77).

Keprihatinan muncul atas keputusan MUI (Majelis Ulama Indonesia), yang seharusnya melindungi dan mengayomi semua golongan umat Islam, justru mengadakan seminar sehari pada 11 Agustus 2002, yang para pembicaranya menghasut agar Ahmadiyah dibubarkan. Dasar para pembicara tersebut ialah keputusan Munas (Musyawarah Nasional) MUI No.5/Kep/Munas/MUI/1980 yang menetapkan Ahmadiyah sebagai jamaah di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Padahal Ahmadiyah menganut rukun iman dan rukun Islam sebagaimana umat Islam lainnya (Akhmad, 2009: 1).

Sebagai pembanding, penulis melihat pada penelitian skripsi Karyadi mengenai komparasi fatwa MUI dengan Jaringan Islam Liberal (JIL) tentang paham mengenai Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Dalam penelitiannya, Karyadi mengungkapkan bahwa Jaringan Islam Liberal meninjau Pasal 28 UUD'45 mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat dilihat bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan mengakui hak-hak asasi rakyatnya dan melindungi dari segala gangguan dari pihak manapun. Selain itu, agama juga menerangkan nilai toleransi dan pluralisme yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al-Hujarat (4): 10, ayat ini menjelaskan dan menerangkan bahwa pilar persaudaraan antar umat beragama, bukan hanya intern umat Islam, sebab kata "mukmin" dalam ayat tersebut dimaknai sebagai seluruh umat yang mengimani Tuhan, apapun agama formalnya. Kemudian Al-Qur'an dalam surat Ali Imran (3): 64, ayat ini menjelaskan istilah

“kalimah sawa” dianggap sebagai kata kunci yang menganjurkan agar masing-masing umat beragama saling mencari titik temu agar tercipta toleransi dan kesatuan atas pluralitas agama (Karyadi, 2009: 79).

Di lain pihak, menyikapi perbincangan seputar paham Ahmadiyah di tengah masyarakat Indonesia, MUI mengambil sikap dengan mengeluarkan fatwa kesesatan paham Ahmadiyah dalam Islam. Fatwa tersebut dikeluarkan pada Munas VII MUI yang dilaksanakan pada tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1526 H/ 26-29 Juli 2005. Dalam Munas tersebut, MUI menetapkan 11 fatwa, yaitu : fatwa mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual, perdukunan dan peramalan, doa bersama, perkawinan beda agama, kewarisan beda agama, kriteria Maslahat, pencabutan hak milik pribadi, wanita menjadi imam Shalat, hukuman mati dalam tindak pidana tertentu, aliran Ahmadiyah dan fatwa mengenai keharaman pluralisme, liberalisme dan sekulerisme agama (Karyadi, 2009: 80).

Kekerasan yang terjadi terhadap jamaah Ahmadiyah, bila melihat pada penjelasan di atas, terjadi karena masyarakat yang anti terhadap Ahmadiyah memiliki senjata untuk melakukan pelanggaran dan tindakan kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah. Senjata tersebut ialah fatwa MUI mengenai kesesatan Ahmadiyah.

Isu-isu atau informasi yang berat sebelah atau bahkan menyesatkan, dapat membuat sebagian orang mempunyai pandangan yang berbeda dan menyebabkan perpecahan. Media massa juga berperan memberikan informasi kepada masyarakat Yogyakarta, baik itu media massa lokal maupun nasional.

Sementara itu, penelitian mengenai berita konflik telah ada yang melakukannya, terutama dengan menggunakan analisis isi. Penelitian Subandini mengenai berita konflik bersenjata di Aceh bertujuan mengetahui orientasi pemberitaan media massa cetak yaitu Kompas dan Waspada terhadap konflik bersenjata di Aceh. Berdasarkan hasil penelitiannya, berita-berita yang dimuat lebih bersifat netral dengan sifat pesan yang informatif. Sumber berita yang dipakai kedua berita lebih didominasi militer dan birokrasi. Yang menarik adalah pemberitaan dari Waspada sebagai media lokal mengenai masalah Aceh dengan menggunakan sumber lain, padahal sebagai media lokal seharusnya mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan yang ada (Subandini, 2001: 131).

Penelitian Hasrullah tentang pemberitaan tentang konflik PDI dan terpilihnya Megawati dalam Kongres PDI di Medan tahun 1996 oleh Kompas, Republika dan Suara Karya, memperlihatkan ada kecenderungan dari ketiga Surat kabar telah memanfaatkan saluran komunikasi politik untuk membentuk opini publik. Surat kabar telah berfungsi ganda yaitu selain berfungsi sebagai saluran komunikasi politik juga berfungsi sebagai komunikator politik bagi kedua kubu yang sedang berkonflik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sifat media nasional lebih cenderung banyak memilih akses sumber berita resmi dengan mempertimbangkan obyektivitas dan etik jurnalisme damai. Sementara sifat media lokal memilih untuk mendekati langsung sumber berita yang dirasakan menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan dengan berbagai versi berita. Kebijakan ini bagi media lokal dianggap menguntungkan dari posisi media,

eksistensi maupun aspek ekonomis dari peningkatan tiras penjualan media di daerah konflik (Hasrullah, 1996: 256-259).

Penelitian yang dilakukan Subandini dan Hasrullah memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaan tersebut diantaranya adalah tema berita yang mengangkat berita konflik, serta digunakannya analisis isi untuk meneliti berita. Khusus dengan Subandini, persamaan juga terletak pada digunakannya jurnalisme damai sebagai unit analisisnya.

Melihat dari pemberitaan-pemberitaan yang ada di media massa, berita mengenai massa yang kontra lebih banyak dari massa yang pro Ahmadiyah. Hal tersebut karena massa yang kontra lebih banyak melakukan aksi, daripada massa yang pro Ahmadiyah.

Beberapa dari aksi-aksi yang dilakukan oleh massa yang kontra dengan Ahmadiyah berujung pada aksi kekerasan. Seperti yang terjadi pada tanggal 11 Maret 2011 di Ciaruteun Udik, Cibungbulang, Bogor, kembali terjadi penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah, padahal baru sebulan setelah penyerangan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik. (www.suaramerdeka.com, diakses 4 Agustus 2011) Kemudian hal tersebut menjadikan berita mengenai pro dan kontra Ahmadiyah menjadi berita besar di Indonesia. Melihat hal tersebut maka jurnalisme damai diperlukan dalam pemberitaan-pemberitaan mengenai pro dan kontra jamaah Ahmadiyah, agar tidak terjadi konflik horizontal dalam masyarakat Indonesia.

Jurnalisme damai bukan membuat berita mengenai siapa yang menang atau siapa yang kalah, melainkan memberikan solusi atas konflik yang terjadi. Hal ini

penting untuk menjernihkan suasana dan mendinginkan suasana, bukan malah membuat suasana menjadi bertambah panas. Jurnalisme damai berorientasi pada perdamaian, menggali proses terjadinya konflik, untuk membantu menemukan titik apinya. Sebenarnya, jurnalisme damai menawarkan pada jurnalis menjadi bagian dalam konflik, sebagai bagian dari solusi untuk menyelesaikan, bukan sebaliknya. Jurnalisme damai sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Johan Galtung pada tahun 1970-an. Berawal dari rasa mirisnya terhadap pemberitaan pers yang mendasarkan pola kerjanya secara hitam-putih, kalah atau menang, atau ia sebut sebagai jurnalisme perang. (Emka, 2005 : 116)

Dalam penelitian ini, penulis mengambil Surat Kabar Harian (SKH) Kedaulatan Rakyat karena merupakan salah satu media cetak besar di Yogyakarta, yang merupakan tempat berkembangnya jamaah Ahmadiyah dengan subur. SKH Kedaulatan Rakyat sebagai media lokal juga menyajikan berita-berita mengenai kasus-kasus jamaah Ahmadiyah. Faktor *Proximity* (kedekatan) berita mengenai jamaah Ahmadiyah dengan masyarakat Yogyakarta tentu saja akan membuat masyarakat Yogyakarta, ingin mengetahui dan mengikuti berita-berita mengenai jamaah Ahmadiyah. Penelitian ini untuk melihat dan menunjukkan bagaimana SKH Kedaulatan Rakyat memberitakan mengenai kasus Ahmadiyah.

Berita-berita yang dimuat dalam SKH Kedaulatan Rakyat seharusnya menggunakan jurnalisme damai sebagai dasar pemberitaannya. Hal ini sangat penting untuk memberikan masukan dan pandangan bagi masyarakat yang membacanya. Bukan hanya itu, tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Yogyakarta, karena di Yogyakarta terdapat kantor pusat jamaah Ahmadiyah

Lahore. Seperti penelitian yang dilakukan Oleh Fandy Akhmad (2009), yang menunjukkan bahwa jamaah Ahmadiyah di Baciro, Yogyakarta dapat hidup damai dan harmonis dengan warga non Ahmadiyah. Untuk melihat penerapan jurnalisme damai yang ada di SKH Kedaulatan Rakyat, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Jurnalisme Damai dalam Pemberitaan SKH Kedaulatan Rakyat Mengenai Kasus Ahmadiyah (Analisis Isi Berita Mengenai Penyerangan Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik)”.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana penerapan jurnalisme damai dalam isi berita SKH Kedaulatan Rakyat pada pemberitaan mengenai kasus Jamaah Ahmadiyah setelah peristiwa Cikeusik?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui penerapan jurnalisme damai dalam berita SKH Kedaulatan Rakyat pada pemberitaan mengenai kasus Jamaah Ahmadiyah setelah peristiwa Cikeusik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah referensi mengenai studi analisis isi kuantitatif dalam ilmu komunikasi.

2. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah pengayaan mengenai jurnalisme damai.

E. Kerangka Teoritik

Kasus kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah di Cikeusik mencuatkan kembali mengenai pro-kontra terhadap ajaran Ahmadiyah di Indonesia. Pro-kontra tersebut menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Media massa sebagai pemberi informasi kepada masyarakat mengenai konflik tersebut, memiliki peranan untuk memberi informasi dengan sebenar-benarnya dan menengahi bahkan memberikan solusi.

Media massa dalam pemberitaan mengenai sebuah konflik hendaknya menggunakan jurnalisme damai. Dalam penulisan berita mengenai jurnalisme damai pada berita konflik, jurnalis hendaknya mengetahui mengenai arti sebuah konflik, tahapan-tahapan terjadinya konflik, solusinya dan juga penerapan jurnalisme damai dalam pemberitaan mengenai konflik, seperti yang ada dibawah ini:

1. Konflik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konflik berarti percekocokan, pertentangan. Sedangkan konflik sosial ialah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Dalam prosesnya, konflik dapat berubah melalui berbagai tahapan aktivitas, intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda. Tahapan-tahapan dalam konflik penting

untuk diketahui dan digunakan bersama alat bantu lainnya untuk menganalisis bermacam-macam dinamika dan kejadian yang berkaitan dengan masing-masing tahapan konflik. Menurut Fisher (Susan, 2009: 95-96) ada beberapa tahapan konflik, yaitu:

a. Pra-konflik

Periode pada saat terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran di antara kedua belah pihak atau lebih, sehingga muncul konflik. Pada tahapan ini, konflik tersembunyi dari pandangan umum, meski pun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan di antara beberapa pihak dan keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain pada tahapan ini.

b. Konfrontasi

Satu tahap dimana konflik mulai terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasakan ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya.

c. Krisis

Pada tahapan ini, konflik mulai pecah menjadi bentuk aksi-aksi kekerasan yang dilakukan secara intensif atau massal. Konflik skala besar, merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua belah pihak terbunuh.

d. Akibat

Pada tahapan ini menunjukkan pada situasi yang disebabkan oleh pecahnya konflik pada tahapan krisis. Bisa jadi salah satu pihak menang

atau kalah, dan bahkan keduanya mengalami kekalahan bersama. Situasi ini sangat tergantung pada proses penanganan konflik. Jika kedua belah pihak mampu melakukan negosiasi dan menggunakan strategi pemecahan masalah (*problem solving*), kemungkinan situasi yang dihasilkan cukup positif dan mengurangi kerugian bersama. Pada tahap ini tingkat kekerasan menurun dengan disertai menurunnya berbagai bentuk konfrontasi pihak-pihak yang berkonflik, dan mulai munculnya inisiatif resolusi konflik.

e. Pasca Konflik

Situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang, dan hubungan mengarah ke lebih normal di antara kedua belah pihak. Namun, jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka yang saling bertentangan tidak ditangani dengan baik, tahap ini sering kembali lagi menjadi situasi prakonflik.

Adanya suatu konflik, tentu saja berdampak pada masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (1990 : 90), dampak konflik antara lain :

- a. Bertambahnya solidaritas anggota kelompok yang berkonflik. Jika suatu kelompok terlibat konflik dengan kelompok lainnya, maka solidaritas antar anggota kelompok tersebut akan meningkat. Bahkan, setiap anggota bersedia berkorban demi keutuhan kelompok dalam menghadapi tantangan dari luar.
- b. Keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai.

- c. Berubahnya kepribadian individu. Dalam konflik sosial, biasanya membentuk opini yang berbeda, ada orang yang setuju dan mendukung, ada pula yang menaruh simpati kepada kedua belah pihak.
- d. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban jiwa. Setiap konflik yang terjadi, umumnya membawa kehancuran dan kerusakan bagi lingkungan sekitarnya. Hal ini karena masing-masing pihak yang bertikai mengerahkan segala kekuatan untuk memenangkan pertikaian. Peristiwa ini menyebabkan penderitaan yang berat bagi pihak-pihak yang bertikai. Rusaknya harta benda dan jatuhnya korban jiwa merupakan wujud nyata akibat konflik.
- e. Akomodasi, dominasi dan takluknya salah satu pihak. Jika setiap pihak yang berkonflik mempunyai kekuatan seimbang, maka akan muncul proses akomodasi, yang menuju pada proses penyesuaian antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok guna mengurangi, mencegah atau mengatasi ketegangan dan kekacauan. Ketidakseimbangan kekuatan antara pihak – pihak yang bertikai menyebabkan dominasi terhadap lawannya, yang menyebabkan takluknya pihak yang didominasi lawannya.

2. Pengertian Berita

Bila ingin memahami apa yang dinamakan berita, diperlukan pemahaman juga mengenai jurnalistik karena keduanya saling terkait. Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat (2005 : 15), dalam buku *Jurnalistik Teori dan Praktik* menjelaskan kata jurnalistik atau *journalisme* berasal dari kata *journal*,

artinya “catatan harian, atau catatan mengenai kejadian sehari-hari, atau juga bisa disebut surat kabar.” Kata *Journal* sendiri berasal dari kata latin *diurnalis*, artinya harian atau tiap hari. Kata ini juga yang kemudian memunculkan istilah jurnalis, yaitu orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik.

Sedangkan definisi jurnalisme sendiri menurut MacDougall yang dikutip oleh Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat (2005: 15) dalam buku *Jurnalistik Teori dan Praktik* adalah “kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa.” Awal mula munculnya kegiatan jurnalistik ini adalah zaman Roma Kuno (59 SM) berupa surat edaran yang disebut *Acta Diurna*. Tak dipungkiri bahwa kegiatan jurnalistik lahir dari media cetak.

Berita memiliki definisi dan arti yang sangat luas. Setiap jurnalis dan ahli dibidang jurnalistik, ketika ditanya mengenai definisi berita, akan memberikan jawaban yang berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988 : 128), berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat.

Sementara itu, Dean M. Lyle Spencer dalam *News Writing*, seperti yang dikutip Deddy Iskandar Muda dalam *Jurnalistik Televisi Menjadi Reporter Profesional*, menyatakan bahwa berita dapat didefinisikan sebagai setiap fakta yang akurat atau suatu ide yang dapat menarik perhatian bagi sejumlah besar pembaca (Muda, 2005 : 21). Deddy Iskandar Muda dalam bukunya yang berjudul *Jurnalistik Televisi Menjadi Reporter Profesional*, mendefinisikan berita sebagai suatu fakta atau ide atau opini aktual yang menarik dan akurat serta dianggap

penting bagi sejumlah besar pembaca, pendengar maupun penonton (Muda, 2005 : 22).

Melihat dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa berita adalah laporan mengenai suatu peristiwa yang besar, yang tidak biasa, dan menarik bagi orang banyak, sehingga banyak orang yang tertarik untuk mengetahui berita tersebut.

Suatu berita haruslah objektif, tidak ada pencampuran antara fakta dan opini. Namun, kenyataannya objektivitas berita masih tergantung pada subjektivitas wartawannya. Objektivitas suatu berita sangatlah penting, terutama dalam kaitannya dengan kualitas informasi. Objektivitas mengandung arti netralitas wartawan itu sendiri. Prinsip itu sangat dihargai dalam kebudayaan modern, termasuk berbagai bidang di luar bidang media massa, terutama dalam kaitan rasionalitas ilmu pengetahuan dan birokrasi; mempunyai korelasi dengan independensi (McQuail, 1996 : 128-130).

Keseimbangan dalam penyajian suatu berita, ikut menentukan objektivitas berita tersebut. Keseimbangan tersebut menurut Siahhan (2001 : 102) ditentukan dengan penyajian berita secara *cover both side* (dua sisi), yaitu menyajikan dua atau lebih gagasan atau tokoh atau pihak-pihak yang berlawanan secara bersamaan dan proporsional, bukan hanya menampilkan berita dengan tipe satu sisi, yaitu berita yang hanya menampilkan satu gagasan atau tokoh atau satu pihak saja. Selain itu juga memiliki nilai imbang (*even handed-evaluation*), yaitu menyajikan evaluasi dua sisi (aspek negatif dan positif) terhadap fakta maupun pihak – pihak yang menjadi berita secara bersamaan dan proporsional.

Tak semua realitas dapat dijadikan berita. Ada hal-hal tertentu yang menentukan suatu peristiwa layak dijadikan berita. Hal ini disebut dengan nilai berita (*news value*). Dalam jurnalistik ada beberapa nilai berita. Menurut Kusumaningrat (2005 : 61-64) nilai berita terbagi dalam :

- a. Aktualitas (*Timeliness*), yaitu yaitu baru terjadi, berkaitan dengan waktu ditemukan.
- b. Kedekatan (*Proximity*), yaitu menyangkut kedekatan geografis atau bisa kedekatan emosional.
- c. Dampak (*Consequences*), yaitu keterkenalan , menyangkut hal -hal yang terkenal dan berdampak pada masyarakat.
- d. *Human interest*, yaitu kejadian yang memberi sentuhan perasaan kepada pembaca.

Sebuah tulisan laporan pasti akan mengandung beberapa nilai berita seperti di atas untuk dapat dikatakan sebagai sebuah berita. Jika kita membaca sebuah surat kabar, maka kita akan mendapatkan berita-berita yang memiliki daya tarik bagi pembacanya. Berita-berita tersebut menurut Kusumaningrat (2005 : 64-66) mengandung unsur *Human Interest* seperti di bawah ini :

- a. Ketegangan (*Suspense*), yaitu berita yang dapat membuat yang membaca menjadi tegang dengan hasil atau akhir dari peristiwa dalam berita.
- b. Ketidaklaziman (*Unusualness*), peristiwa yang tidak lazim atau aneh akan membuat orang tertarik.
- c. Minat Pribadi (*Personal Interest*), misalnya mengenai masakan, produsen motor mengeluarkan motor seri terbaru.

- d. Konflik (*Conflict*), yaitu berita mengenai konflik. Berita-berita mengenai pertentangan selalu menarik minat masyarakat.
- e. Simpati (*Sympathy*), yaitu berita yang dapat membuat pembacanya merasa simpati dengan kejadian tersebut.
- f. Kemajuan (*Progress*), yaitu berita mengenai kemajuan dalam masyarakat, baik itu dalam bidang teknologi, ekonomi, pembangunan.
- g. Seks (*Sex*), yaitu berita mengenai seks, seperti skandal seks anggota DPR, perselingkuhan anggota DPR dengan pembantunya.
- h. Usia (*Age*), yaitu berita mengenai seseorang yang tidak lazim pada umurnya, seperti berita mengenai orang yang berusia lebih dari 100 tahun.
- i. Binatang (*Animal*), yaitu berita mengenai keanehan pada binatang, seperti berita tentang sapi yang berkaki dua.
- j. Humor (*Humor*), yaitu berita yang dapat membuat pembacanya tersenyum bahkan tertawa.

Dalam suatu berita akan mengandung unsur-unsur di atas dan unsur-unsur tersebut ditemukan dalam kombinasi-kombinasi. Berita yang mengandung unsur *human interest* akan memiliki kecenderungan untuk menjadi berita yang menarik dan populer.

Sesuatu yang berbau konflik memang menarik untuk disimak, karena konflik dan keresahan sosial tidak dapat dipisahkan dari berita. Penekanan berita mengenai suatu peristiwa konflik sosial tanpa disadari akan mengakibatkan situasi menjadi lebih buruk atau sebaliknya, mengembalikan kesadaran sosial untuk kembali damai. Pendekatan konflik terhadap liputan berita memberi ruang berita

dan waktu berita yang utama bagi mereka yang memaksakan kekerasan dan seringkali mengabaikan mereka yang berusaha mencari pemecahan non-kekerasan. Namun, ada kemungkinan bahwa liputan dengan pendekatan konflik justru akan menunjukkan letak kesalahan yang benar, sehingga diperoleh jalan keluar dengan lebih bijaksana.

3. Jurnalistik dan Pemberitaan konflik

Dahulu masyarakat hanya mendapatkan informasi dari mulut ke mulut saja. Sekarang, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat bisa mendapatkan informasi dari berbagai macam sumber media massa, antara lain surat kabar, radio, televisi, dan juga internet. Dari berbagai media massa tersebut masyarakat dapat mengetahui mengenai berbagai macam informasi, baik mengenai masalah sosial, politik, ekonomi, keamanan dan juga hiburan.

Di negara demokratis seperti Indonesia, masyarakat memiliki hak untuk berpikir, menyatakan pendapat, dan juga mendapatkan informasi yang sebenarnya. Media massa merupakan alat untuk melakukan semua itu. Media massa berperan sebagai pemberi informasi yang benar, karena dengan mendapatkan informasi yang benar, masyarakat dapat mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakatnya.

Seperti kasus mengenai jamaah Ahmadiyah, media massa berperan untuk memberi informasi yang benar mengenai peristiwa yang terjadi, karena hal itu merupakan fungsi dari media. Beberapa fungsi media dalam pemberitaan konflik (Setiati, 2005 : 68), yaitu sebagai:

a. *Issue Intensifier*

Dalam hal ini media berpotensi memunculkan isu atau konflik, dan mempertajamnya. Dengan posisinya sebagai *intensifier*, media dapat mem-*blow-up* realita menjadi suatu isu sehingga dimensi isu menjadi transparan. Media memberikan informasi secara periodik dan berkelanjutan mengenai Ahmadiyah yang mencuat kembali setelah kasus penyerangan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik.

b. *Conflict Diminisher*

Media dapat menenggelamkan suatu isu atau konflik. Secara sengaja media juga dapat meniadakan isu tersebut, terutama bila menyangkut kepentingan media yang bersangkutan, entah kepentingan ideologis atau yang lainnya. Apabila konflik yang terjadi semakin memanas dan berkepanjangan, dan berisiko untuk menjadi semakin besar, media dapat dengan sengaja menenggelamkan isu mengenai konflik mengenai Ahmadiyah. Media juga dapat melakukan hal tersebut bila isu tersebut sudah tidak sesuai dengan apa yang menjadi ideologi media tersebut.

c. *Conflict Resolution*

Media berfungsi sebagai mediator dengan menampilkan isu dari berbagai perspektif serta mengarahkan pihak yang bertikai pada penyelesaian konflik. Dalam kasus mengenai jamaah Ahmadiyah, media berfungsi menjadi penengah dan menjadi mediator dengan mempertemukan kedua belah pihak yang pro dan kontra serta pengikut ajaran Ahmadiyah.

Media massa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi khalayak, oleh karena itu media wajib menyampaikan informasi yang jujur dan sebenarnya mengenai suatu konflik kepada khalayak, sesuai dengan fakta di lapangan. Media harus dapat mencerahkan pikiran khalayak, yang berarti bahwa media membuat pemberitaan yang berimbang dan tidak membuat suasana menjadi semakin panas sehingga dapat memecah persatuan, dan merusak kerukunan masyarakat.

4. Jurnalisme Damai dalam pemberitaan konflik

Berita merupakan bentuk kewajiban dan tanggung jawab media kepada masyarakat. Jurnalis menyampaikan laporan berupa fakta dan kejadian yang memiliki nilai berita yang disampaikan secara periodik. Dalam membuat suatu berita, jurnalis dituntut untuk obyektif. Namun, pada kenyataannya, obyektifitas tersebut masih tergantung pada subyektifitas jurnalis. Subyektifitas yang dimaksud adalah subyektifitas mengenai pemilihan peristiwa yang akan diberitakan. Media lebih memilih untuk memberitakan hal-hal yang berbau dramatis dan kekerasan, yang banyak terdapat dalam sebuah konflik. Hal inilah yang menyebabkan pemberitaan mengenai konflik biasanya memiliki porsi yang lebih besar.

Salah satu cara yang dapat digunakan oleh jurnalis untuk menghindari konflik atau mencegah terjadinya kekerasan akibat adanya konflik ialah dengan menerapkan jurnalisme damai dalam pemberitaan. Jurnalisme damai berbeda dengan jurnalisme perang. Adapun perbedaannya dan juga dapat dikatakan sebagai karakteristik keduanya, yang telah disarikan oleh Puspawati berdasarkan dari pendapat Johan Galtung (Puspawati, 2004: 42-43) :

TABEL 1. 1**Jurnalisme Damai dan Jurnalisme Perang**

	Jurnalisme Damai	Jurnalisme Perang
Penentuan Angle dan Fokus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus pada proses terjadinya konflik pihak-pihak yang terlibat, penyebab pertikaian, permasalahan yang menyertai, berorientasi pada “menang-menang” 2. Ruang dan waktu yang terbuka; sebab-akibat dalam perspektif sejarah 3. Memberitakan konflik apa adanya 4. Memberi ruang pada semua suara/versi; menampilkan empati dan pengertian 5. Melihat konflik atau perang sebagai sebuah masalah, fokus pada hikmah konflik 6. Melihat aspek humanisasi di semua sisi/pihak 7. Pro-aktif; pencegahan sebelum konflik/perang terjadi 8. Fokus pada dampak non-fisik kekerasan (trauma dan kemenangan, kerusakan pada struktur dan budaya masyarakat) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus pada arena konflik dua kubu bertikai, hanya satu tujuan (kemenangan), situasi peperangan, orientasi “menang-kalah” 2. Ruang dan waktu tertutup; sebab-akibat terbatas pada arena konflik, mencari siapa yang menyerang duluan 3. Ada fakta yang sengaja disembunyikan 4. Berita memilahkan “kita-mereka”, nuansa propaganda, suara dari dan untuk “kita” 5. Melihat “mereka” sebagai masalah, fokus pada siapa yang menang perang 6. Dehumanisasi di pihak “mereka” humanisasi di pihak “kita” 7. Reaktif; menunggu terjadi konflik, baru buat reportase 8. Fokus pada dampak fisik kekerasan (pembunuhan, luka, kerugian material)
Orientasi Liputan	Ketidak-benaran di kedua belah pihak, membongkar “cover-up”	Hanya mengungkap ketidak-benaran “mereka” dan menutupi ketidak-benaran “kita”
Cara Pandang Terhadap Konflik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus pada penderitaan semua: perempuan, anak-anak, orang tua, memberi suara pada korban 2. Menyebut nama pelaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus pada penderitaan “kita”, memberi suara hanya pada panglima perang 2. Menyebutkan pelaku

	kejahatan di kedua belah pihak 3. Fokus pada para penggiat perdamaian di tingkat akar rumput	kejahatan di pihak “mereka” 3. Fokus pada penggiat perdamaian di tingkat elit
Pandangan Terhadap Akhir Konflik	1. Perdamaian = anti kekerasan + hikmah 2. Mengangkat inisiatif perdamaian dan mencegah perang berlanjut 3. Fokus pada struktur dan budaya masyarakat yang damai 4. Usai konflik resolusi, rekonstruksi dan rekonsiliasi	1. Perdamaian = kemenangan + gencatan senjata 2. Menyembunyikan inisiatif perdamaian sebelum kemenangan diraih 3. Fokus pada fakta dan institusi masyarakat yang terkendali 4. Usai konflik siap bertempur lagi bila “luka lama kambuh”

Sumber: Johan Galtung disarikan oleh Puspawati, 2004: 42 – 43

Peristiwa penyerangan jamaah Ahmadiyah di Cikuesik telah menyebabkan tiga orang tewas yang melibatkan banyak orang. Nyawa satu orang saja tidak ternilai harganya, apalagi dengan nyawa tiga orang yang melayang dalam peristiwa penyerangan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik. Oleh karena itu, maka peristiwa tersebut dapat dikatakan peristiwa yang besar yang berpengaruh pada masyarakat Indonesia di tengah pro dan kontra mengenai ajaran Ahmadiyah. Sedangkan pemilihan SKH Kedaulatan Rakyat sebagai obyek penelitian karena unsur *proximity* atau kedekatan dengan masyarakat Yogyakarta sebagai pembacanya. Masyarakat Yogyakarta yang selama ini hidup berdampingan dengan jamaah Ahmadiyah, sudah tentu mengikuti perkembangannya.

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual yang mendasari penelitian penulis ialah dengan melihat beberapa karakteristik jurnalisme damai dan juga tipe peliputan berita mengenai jamaah Ahmadiyah setelah penyerangan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik.

Untuk mendapatkan data yang diinginkan agar dapat membantu memudahkan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan ini, data yang diperoleh akan diusahakan dalam bentuk unit analisis berita. Unit analisis yang masing-masing masuk terlebih dahulu yaitu unit-unit terkecil. Unit analisis merupakan indikator yang ditetapkan sebagai konsep operasional, unit ditetapkan sesuai dengan apa yang diinginkan diketahui oleh peneliti terhadap isi dengan menilik pada tabel 1.1. Dalam prosesnya, karena keterbatasan waktu, dana dan juga tenaga maka setiap unit analisis akan dimudahkan oleh kategorisasi-kategorisasi sebagai berikut:

TABEL 1. 2

Unit Analisis dan Kategorisasi Urutan Isi yang Dianalisis

No	Unit Analisis	Kategorisasi
1	Tipe peliputan	- Satu sisi. - Dua sisi.
2	Fokus berita	- Fokus pada proses terjadinya konflik - Fokus pada arena konflik
3	Orientasi liputan	- Mengungkap kebenaran di kedua belah pihak. - Mengungkap kebenaran di satu pihak.
4	Pandangan terhadap konflik	- Menyebut nama pelaku kejahatan di kedua belah pihak. - Menyebut nama pelaku kejahatan hanya di salah satu pihak. - Tidak menyebutkan sama sekali.

5	Pandangan terhadap akhir konflik	<ul style="list-style-type: none"> - Mengangkat inisiatif perdamaian dan mencegah perang berlanjut. - Menyembunyikan inisiatif perdamaian sebelum kemenangan diraih.
---	----------------------------------	--

G. Definisi Operasional

Merunut pada definisi konseptual di atas, maka peneliti ingin menjelaskan bagaimana operasionalisasinya sebagai berikut :

1. Tipe Peliputan yaitu cara kerja wartawan dalam menempatkan suatu berita terhadap nara sumber yang bertikai untuk kategorisasinya dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

a. Tipe peliputan satu sisi yaitu pemberitaan yang hanya berdasarkan dari satu gagasan atau tokoh atau satu pihak saja, yaitu berita yang mengandung salah satu atau lebih dari kriteria di bawah ini :

- 1) Hanya memberitakan mengenai pihak Ahmadiyah saja.
- 2) Hanya memberitakan mengenai pihak yang menolak Ahmadiyah saja.
- 3) Hanya memberitakan mengenai pihak yang netral (pihak yang menjadi penengah) saja.

b. Tipe peliputan dua sisi yaitu pemberitaan yang menyajikan dua atau lebih gagasan atau tokoh atau pihak – pihak yang berlawanan secara bersamaan.

Berita tersebut mengandung salah satu atau lebih dari kriteria berikut :

- 1) Memberitakan pihak Ahmadiyah dan pihak yang menolak Ahmadiyah.
- 2) Memberitakan mengenai pihak Ahmadiyah dan pihak yang netral.
- 3) Memberitakan pihak yang menolak Ahmadiyah dan pihak yang mendukung Ahmadiyah.

- 4) Memberitakan pihak yang menolak Ahmadiyah dan pihak yang netral.
- 5) Memberitakan pihak yang mendukung dan pihak yang netral.
- 6) Memberitakan pihak Ahmadiyah, pihak yang menolak Ahmadiyah, dan juga pihak yang netral.

2. Fokus berita, yaitu :

- a. Fokus pada proses terjadinya konflik, yang memiliki salah satu atau lebih kriteria di bawah ini :

- Berita yang memuat penyebab pertikaian
- Berita mengenai permasalahan yang menyertai
- Berita yang berorientasi pada “menang-menang”

- b. Fokus pada arena konflik, yang memiliki salah satu atau lebih kriteria di bawah ini:

- Berita yang bersifat hanya satu tujuan, yaitu kemenangan di satu pihak
- Berita yang memuat situasi konflik
- Berita yang berorientasi pada “menang-kalah”

3. Orientasi liputan, sebagai berikut :

- a. Melihat ketidakbenaran di kedua belah pihak. Pemberitaan yang mengungkapkan apa yang tidak benar dari pihak yang mendukung atau menolak Ahmadiyah. Yaitu, berita yang memberikan informasi mengenai fakta-fakta yang ada baik itu dari narasumber maupun fakta di lapangan mengenai pihak Ahmadiyah dan juga pihak yang menolak Ahmadiyah.
- b. Mengungkap ketidakbenaran di satu pihak, yaitu pemberitaan yang hanya menunjukkan ketidakbenaran yang ada pada pihak yang mendukung

Ahmadiyah atau menutupi ketidakbenaran pihak yang menolak Ahmadiyah, atau sebaliknya.

4. Pandangan terhadap konflik, merupakan pandangan mengenai cara mengakhiri konflik. Untuk kategorisasinya adalah sebagai berikut:
 - a. Menyebut nama kedua belah pihak, yaitu berita yang menyebutkan nama yang dianggap melakukan tindakan yang melanggar hukum atau bersalah dari dua pihak yang bertikai.
 - b. Menyebut nama hanya di salah satu pihak, yaitu berita yang hanya menyebutkan nama yang dianggap melakukan tindakan melanggar hukum atau bersalah dari satu pihak yang bertikai saja. Berita yang termasuk seperti itu ialah berita yang hanya menyebutkan nama pihak Ahmadiyah saja atau berita yang hanya menyebutkan nama pihak yang menolak Ahmadiyah.
 - c. Tidak menyebutkan nama sama sekali, yaitu pemberitaan yang tidak menyebutkan nama pihak yang dianggap bersalah atau melakukan tindakan kriminal.
5. Pandangan terhadap akhir konflik merupakan pandangan terhadap akhir dari konflik yang berlangsung. Untuk kategorisasinya antara lain :
 - a. Mengangkat inisiatif perdamaian dan mencegah perang berlanjut, pemberitaan yang berorientasi pada perdamaian. Yaitu berita yang memberikan solusi bagi kedua belah pihak, baik itu secara langsung maupun pendapat dari pihak yang dianggap netral.

- b. Menyembunyikan inisiatif perdamaian sebelum kemenangan diraih. pemberitaan yang tidak berorientasi pada perdamaian sebelum melihat siapa yang akan menang. Yaitu, berita yang tidak memberikan solusi perdamaian terhadap konflik mengenai Ahmadiyah.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif, artinya penelitian bermaksud menggambarkan bentuk penyajian dan isi pesan dari berita - berita tentang penyerangan Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik dalam SKH Kedaulatan Rakyat (Februari-Maret 2011). Definisi analisis isi menurut Berelson (dalam Nazir, 1985: 105) analisis isi adalah teknik penelitian untuk melukiskan isi komunikasi yang secara nyata objektif, sistematis dan kuantitatif.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah berita tentang kasus jamaah Ahmadiyah yang dimuat di SKH Kedaulatan Rakyat periode Februari 2011 hingga Maret 2011.

3. Populasi dan *Sample*

Populasi penelitian untuk analisis isi ini adalah berita mengenai Jamaah Ahmadiyah di SKH Kedaulatan Rakyat. Unit analisis penelitian ini adalah konten berita mengenai jamaah Ahmadiyah dari Februari 2011- Maret 2011. Periode tersebut dipilih, karena pada periode tersebut mulai muncul lagi konflik mengenai

jamaah Ahmadiyah. Diperoleh 36 artikel dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan *total sampling*, sehingga semua populasi yang ada diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Lebih lanjut dijelaskan terdapat beberapa konsep tentang analisis isi yaitu sebagai berikut (1) Observasi dokumentasi, yaitu mencermati pemberitaan tentang konflik mengenai jamaah Ahmadiyah di SKH Kedaulatan Rakyat bulan Februari-Maret 2011), (2) Kepustakaan, yaitu dengan membaca buku, hasil penelitian yang telah ada atau literatur lainnya yang mendukung dan relevan dengan penelitian ini (3) Pengkodean, dipakai dalam analisis isi dan pengukuran unit analisis pemberitaan mengenai kasus jamaah Ahmadiyah periode Februari-Maret 2011 di SKH Kedaulatan Rakyat. *Coding sheet* (lembar koding) terstruktur, yang telah memuat nilai *item-item* indikator variabel yang dikoding. Pengkoding dalam penelitian ini adalah sebanyak 2 orang yang ditentukan oleh peneliti, yang dianggap mempunyai kemampuan terhadap topik yang diteliti. Pengkoding akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dan batasan-batasan dalam unit analisis dan kategorisasi yang berkaitan dengan lembar koding (*coding sheet*), agar mempermudah dalam melakukan pengkodean. Hasil koding akan dilakukan uji reliabilitas agar penelitian ini mencapai hasil yang obyektif dan reliabel.

5. Reliabilitas

Reliabilitas adalah suatu hal yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Reliabilitas pada dasarnya merupakan ukuran kapasitas data yang digunakan dalam proses penelitian untuk memenuhi

tingkat objektivitas. Untuk melakukan suatu pengukuran diperlukan pengkoding dan pengkoder untuk mengukur realibilitas dalam analisis isi digunakan formula R. Holsty (Kriyantono, 2006: 236 - 237), yaitu :

$$CR : \frac{2M}{NI + N2}$$

Keterangan:

CR : Coeficient Reliability (dengan ambang penerimaan 0,60)

M : Jumlah pertanyaan yang disetujui oleh pengkode NI dan N2

N1 : Pengkode/kode 1

N2 : Pengkode/kode 2

Pengujian ini dilakukan dengan melakukan dokumentasi artikel – artikel yang didapatkan, kemudian memasukkannya ke dalam lembar koding sesuai dengan kategorisasi yang telah ditentukan. Setelah itu seorang hakim akan melakukan uji reliabilitas terhadap kategorisasi tersebut dengan cara yang sama seperti halnya peneliti.

Ambang penerimaan yang dipakai untuk uji reliabilitas adalah 0,60. Jika persetujuan antar pengkoding (peneliti dan hakim) tidak mencapai 0,60, artinya kategorisasi yang dibuat belum mencapai tingkat keterandalan atau kepercayaan. Maka kategorisasi operasional perlu dirumuskan lebih spesifik lagi.

Pengolahan dan analisis data ini dilakukan dengan tetap mengacu pada teori–teori yang berhubungan dengan masalah dan kemudian ditarik kesimpulan dan saran–saran.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif yaitu melalui pengkodean dengan menghitung frekuensi (f) kemunculan unit analisis yang sudah ditetapkan dalam kerangka konsep melalui *Coding Sheet* yang terdiri atas: 1) judul; 2) Nama Peneliti 3) koran; 4) hari dan tanggal; 5) unit analisis; 6) Nama pengkodean dan 7) tabel distribusi frekuensi, yang akan dimasukkan ke dalam table dan tabulasi silang untuk mempermudah proses penelitian. Hasil yang ada selanjutnya dijelaskan secara kualitatif bagaimana jurnalisme damai diterapkan oleh SKH Kedaulatan Rakyat dalam pemberitaan mengenai jamaah Ahmadiyah setelah penyerangan di Cikeusik.